

Nama : Kiki Epraim Siallagan
NPM : 2526061013
Prodi : Magister Ilmu Administrasi

Policy Paper:
Penanganan Banjir pada Ruas Jalan Negara di Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan banjir cukup tinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan penelitian Mailela (2021), sekitar 62,99% wilayah Kabupaten Pringsewu termasuk kategori rawan banjir akibat kondisi topografi dataran rendah dan tingginya curah hujan. Selain itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengidentifikasi beberapa ruas jalan nasional di wilayah Pringsewu sebagai titik rawan genangan akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal (BPJN Lampung, 2026).

Policy paper ini menggunakan pendekatan evidence-based policy dengan memanfaatkan data empiris, penelitian terdahulu, laporan pemerintah, dan kondisi faktual lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama banjir pada ruas jalan negara di Kabupaten Pringsewu meliputi buruknya drainase jalan, sedimentasi saluran air, alih fungsi lahan, tingginya intensitas curah hujan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan pendekatan penanganan yang lebih terpadu dan berkelanjutan melalui revitalisasi drainase jalan nasional, normalisasi saluran air, penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, menjaga kualitas infrastruktur jalan, serta meningkatkan ketahanan transportasi di Kabupaten Pringsewu.

1. BAGIAN 1: KONDISI MASALAH

Banjir pada ruas jalan negara di Kabupaten Pringsewu merupakan persoalan infrastruktur publik yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik, aktivitas ekonomi, serta kualitas pelayanan transportasi. Ruas jalan negara memiliki fungsi strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah di Provinsi Lampung sehingga gangguan akibat banjir dapat memengaruhi aktivitas regional secara luas. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Pringsewu mengalami genangan berulang ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Adapun ruas jalan yang dimaksud yaitu Jalan Lintas Barat ruas Pekon Tambahrejo dan Pekon

Wates, Kecamatan Gading Rejo, dan Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu. Kondisi banjir tersebut menunjukkan bahwa sistem drainase jalan dan tata kelola lingkungan belum mampu mengantisipasi peningkatan debit air secara optimal.

Kabupaten Pringsewu termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Mailela (2021), sekitar 62,99% wilayah Kabupaten Pringsewu termasuk kategori rawan banjir akibat kondisi topografi, penggunaan lahan, dan tingginya intensitas curah hujan. Selain itu, hasil identifikasi pasca banjir Sungai Way Mincang menunjukkan bahwa limpasan air menyebabkan genangan pada sejumlah akses jalan utama yang menghubungkan pusat aktivitas masyarakat (Suwandi, 2022). Pada awal tahun 2025, banjir juga menggenangi ruas jalan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu sehingga menghambat mobilitas kendaraan dan aktivitas masyarakat.

Permasalahan banjir pada ruas jalan negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan, buruknya sistem drainase jalan, alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan infrastruktur dan mitigasi bencana. Genangan air di titik Pekon Tambahrejo tidak hanya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, namun peralihan lahan sawah yang telah berubah menjadi pemukiman warga. Selain itu, penyempitan drainase akibat sedimentasi yang meningkat (termasuk akibat penumpukan sampah) juga menjadi faktor pendukung.

Kondisi lain terjadi pada titik Pekon Wates. Banjir yang menggenangi ruas jalan tidak lepas dari pengerukan batu pada pegunungan di wilayah tersebut. Pengerukan yang berujung penggundulan tanah berdampak pada aliran air yang tidak terserap dan tertampung oleh tanah dan pohon. Selain itu, kondisi di Pekon Sidoarjo juga berbeda. Selain faktor hujan, genangan air diakibatkan oleh air yang tidak dapat mengalir dan tertahan di titik terendah atau cekungan pada bagian tertentu. Penyempitan dan berkurangnya volume aliran drainase tidak mampu menahan sehingga air cenderung meluap ke jalan. Semua fenomena tersebut sejalan dengan temuan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung yang mencatat adanya sejumlah titik rawan genangan pada ruas jalan nasional di Kabupaten Pringsewu akibat drainase yang tidak berfungsi optimal (BPJN Lampung, 2026).

Policy paper ini menggunakan pendekatan evidence-based policy dengan memanfaatkan data empiris, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian ilmiah sebagai

dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan pendekatan penanganan yang lebih terpadu dan berkelanjutan melalui revitalisasi drainase jalan nasional, normalisasi saluran air, penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, menjaga kualitas infrastruktur jalan, serta meningkatkan ketahanan transportasi di Kabupaten Pringsewu.

2. BAGIAN II: PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Policy paper ini menggunakan pendekatan evidence-based policy sebagai metode penyusunan rekomendasi kebijakan. Evidence-based policy merupakan pendekatan yang menempatkan data empiris, hasil penelitian, dan bukti faktual sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pendekatan ini digunakan agar kebijakan penanganan banjir pada ruas jalan negara di Kabupaten Pringsewu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab akar persoalan secara objektif dan terukur.

Pendekatan yang diambil memerlukan upaya yang serius terhadap fenomena banjir dan genangan air yang berdampak pada aktivitas masyarakat, tata ruang, dan ekosistem yang ada dalam wilayah terdampak. Beberapa pendekatan yang perlu diambil antara lain:

- Eksplorasi tuntas faktor mendasar penyebab banjir. Secara umum faktor penyebab pada semua titik genangan air relatif sama, namun memiliki faktor sumber dominan yang berbeda. Riset terhadap penyebab awal banjir perlu dilakukan. Proses ini dapat melibatkan lintas sektor seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan akademisi serta komunitas lingkungan. Selain itu, analisis dengan mengidentifikasi hubungan antara faktor penyebab banjir dengan kondisi infrastruktur yang ada juga dapat dilakukan.
- Evaluasi kebijakan eksisting. Kebijakan penanganan banjir yang telah dilakukan pemerintah lebih banyak berfokus pada respons pascabencana. Pembersihan drainase dan rehabilitasi jalan biasanya dilakukan setelah terjadi genangan. Padahal, menurut Kementerian PUPR (2023), pengelolaan infrastruktur jalan seharusnya menggunakan pendekatan mitigasi risiko untuk mengurangi kerusakan jangka panjang.
- Penentuan solusi jangka pendek sebagai pemulihan dan mitigas dini. Pada kasus banjir di Pekon Sidoarjo, kualitas air dan infrastruktur drainase dan jalan semakin

memburuk. Hal ini bukan tidak mungkin menjadi lebih degeneratif jika tidak ada upaya konkrit untuk penyelesaian masalah yang ada. Solusi seperti pelebaran dan pengerukan drainase merupakan solusi tercepat untuk mengurangi dampak genangan pada kondisi hujan selanjutnya.

Tanpa adanya transformasi tata kelola, kebijakan, dan aksi dalam upaya menyelesaikan permasalahan banjir yang ada, maka tidak ada jaminan bahwa kondisi akan aman pada periode waktu berikutnya. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (2021), jalan yang terendam genangan secara terus-menerus dapat mengalami kerusakan dua kali lebih cepat dibandingkan kondisi normal. Genangan air dapat diselesaikan dengan upaya-upaya reaktif seperti meninggikan jalan dan memperbaiki sistem drainase. Namun itu merupakan solusi jangka pendek. Agar terjadi keberlanjutan, maka diperlukan kajian terkait kebijakan yang tepat untuk memitigasi dan menghindari kondisi banjir yang sama di masa yang akan datang. Jika pemangku kebijakan masih melihat masalah ini dengan cara yang sama, maka tidak menutup kemungkinan dampak yang akan terjadi akan melebihi dari kondisi sebelumnya.

3. BAGIAN III: KERANGKA REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penanganan banjir pada ruas jalan negara di Kabupaten Pringsewu memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis evidence-based policy, rekomendasi kebijakan tidak hanya berfokus pada penanganan fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, mitigasi bencana, dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut penting karena permasalahan banjir pada ruas jalan negara dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari sistem drainase, tata ruang wilayah, hingga koordinasi antarinstansi.

Kerangka rekomendasi pertama adalah revitalisasi sistem drainase pada ruas jalan negara di Kabupaten Pringsewu. Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung perlu melakukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas drainase pada titik-titik rawan genangan. Revitalisasi drainase harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan peningkatan debit air akibat tingginya curah hujan dan perkembangan kawasan permukiman. Selain pembangunan drainase baru, pemerintah juga perlu melakukan pemeliharaan rutin seperti pengerukan sedimentasi dan pembersihan saluran air agar drainase dapat berfungsi secara optimal. Dalam pelaksanaan kebijakan ini,

aktor utama yang terlibat adalah BPJN Lampung sebagai penanggung jawab jalan nasional, Kementerian PUPR, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu yang mendukung koordinasi teknis di daerah.

Rekomendasi kedua adalah normalisasi sungai dan saluran air untuk mengurangi limpasan air menuju badan jalan. Kondisi sungai dan drainase yang mengalami sedimentasi menyebabkan kapasitas aliran air menurun sehingga meningkatkan risiko banjir ketika musim hujan. Oleh karena itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung bersama pemerintah daerah perlu melakukan pengerukan sedimentasi dan normalisasi saluran air secara berkala. Selain itu, pengawasan terhadap pembangunan di sekitar daerah aliran sungai juga harus diperkuat agar tidak mempersempit aliran air. Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini meliputi BBWS Mesuji Sekampung, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah kecamatan dan desa yang berada di sekitar wilayah sungai.

Kerangka rekomendasi berikutnya adalah penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur jalan berbasis mitigasi bencana. Selama ini penanganan kerusakan jalan akibat banjir lebih banyak dilakukan setelah genangan terjadi sehingga bersifat reaktif. Padahal, menurut Kementerian PUPR (2023), pengelolaan infrastruktur jalan seharusnya menggunakan pendekatan mitigasi risiko untuk mengurangi kerusakan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan sistem pemetaan titik rawan banjir, monitoring kondisi drainase, dan inspeksi berkala terhadap struktur jalan nasional di Kabupaten Pringsewu. Kebijakan ini memerlukan keterlibatan BPJN Lampung, Kementerian PUPR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta lembaga teknis terkait dalam penyusunan sistem mitigasi dan pengawasan infrastruktur.

Selain aspek teknis, penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam kerangka rekomendasi kebijakan. Penanganan banjir pada ruas jalan negara melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan yang berbeda sehingga sering kali terjadi tumpang tindih atau kurangnya sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan forum koordinasi terpadu yang melibatkan BPJN Lampung, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, BBWS Mesuji Sekampung, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat kecamatan dan desa. Forum tersebut berfungsi untuk menyusun perencanaan bersama, menentukan prioritas penanganan titik rawan banjir, serta mempercepat koordinasi ketika terjadi bencana banjir.

Kerangka rekomendasi lainnya adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi banjir. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga fungsi drainase dan mengurangi penyumbatan saluran air akibat sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program edukasi lingkungan terkait pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, dan pentingnya menjaga daerah resapan air. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam sistem pelaporan titik genangan dan pengawasan kondisi drainase di lingkungan sekitar. Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini meliputi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, komunitas lingkungan, serta masyarakat setempat sebagai pelaksana utama pengawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, kerangka rekomendasi kebijakan penanganan banjir pada ruas jalan negara di Kabupaten Pringsewu memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, dan masyarakat. Pendekatan yang terpadu dan berbasis bukti diharapkan mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan, meningkatkan ketahanan infrastruktur jalan nasional, serta mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

DAFTAR PUSTAKA

- Mailela, Cristia. (2021). “PEMETAAN PREDIKSI DAERAH RAWAN BANJIR MENGGUNAKAN METODE OVERLAY DAN ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP) (Studi Kasus : Kabupaten Pringsewu, Lampung)” Institut Teknologi Nasional Malang.
- Suwandi, E. (2022). Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP). *Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)*, 2(04), 2–4.
- Sozometa, R. (2026). *BPJN Lampung antisipasi lima titik jalan rawan banjir di jalur mudik*. Antara Lampung. lampung.antaranews.com.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2021). *Surat Edaran tentang Pedoman Desain Drainase Jalan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.